

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PERANTARA KEMISKINAN DI DESA BANDAR SETIA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Zainuddin Nasution

Dosen Tetap FISIP UISU

Latifah Hanum

Dosen Tetap FKIP UISU

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is one of the policies of the government that can help reduce poverty in Indonesia, where in this Harahap Family Program the target is KPM (Beneficiary Group). assistance from PKH, with the requirements that the KPM must fulfill the obligations that have been regulated and stipulated in the general PKH guidelines related to improving human resources (Human Resources). In the short term, PKH aims to reduce the free expenditure of poor families and in the long term, PKH is a program that is expected to break the poverty chain between generations and is also expected to improve the quality of human resources in the fields of education, health and social welfare. This study aims to determine the process of implementing the Family Hope Program (PKH) in Bandar Setia village, Percut Sei Tuan sub-district and to describe the obstacles in implementing PKH in this village. The method used in this research is descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation and literature study. Based on the results of the study, it was shown that in general the process of implementing the PKH program in Bandar Setia village, Percut Sei Tuan sub-district, was quite good. This can be

seen from every stage of the implementation process that went well and smoothly, although here and there there are still some shortcomings, but overall the goals and objectives of this PKH have been achieved well.

Kata kunci :Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan merupakan hal yang esensial bagi sebuah negara, karena kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Ketika seseorang ataupun sekelompok orang tergolong dalam kondisi miskin, maka masalah pendidikan dan kesehatan tidaklah menjadi prioritas bagi mereka karena bagi mereka yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan pokok mereka yakni sandang dan pangan.

Menyadari akan hal ini, maka pemerintah telah menyusun dan mengimplementasikan berbagai program pengentasan dan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan berada di Kementerian Sosial.

PKH merupakan program yang memberikan bantuan dalam bentuk tunai dan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila mereka memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni masalah Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan pokok dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan sasaran PKH adalah KPM berdasarkan basis data terpadu.

Dalam komponen kesejahteraan topik terdapat beberapa klasifikasi diantaranya ; disabilitas berat, disabilitas ringan dan lansia. Adapun kewajiban peserta PKH bidang kesehatan meliputi ; pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, imunisasi serta timbang badan anak Balita dan anak pra sekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang Sekolah Dasar dan Menengah, dan kewajiban para penyandang disabilitas disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya (*Pedoman PKH tahun 2018*).

Karena masalah kemiskinan bukan hanya dialami oleh masyarakat pedesaan, akan tetapi terdapat pula ditengah-tengah masyarakat perkotaan seperti halnya di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan objek penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topik ini dengan menetapkan judul “**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perantara Kemiskinan Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”

Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi.

Winarno, (2002 ; 101) “*suatu kebijakan dalam arti luas sebagai alat administrasi hukum, dimana berbagai system, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan*“ Pressman dan Wildasky, (dalam Putra 2003:80) “*interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan, ataupun kemampuan untuk menghubungkan secara kausalitas antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya*”

2. Model Implementasi Kebijakan.

Dalam Tangkilisan (2003:20) “*implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu :*

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

b) Sumber Daya

Berwujud Sumber Daya Manusia (SDM) yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis.

d) Struktur Birokrasi

Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

3. Pengertian Kemiskinan.

Siagian (2012:1-2) “*kemiskinan merupakan masalah pribadi, keluarga, masyarakat, Negara bahkan dunia*” PBB sendiri mempunyai agenda khusus sehubungan dengan penanggulangan kemiskinan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), institusi internasional tersebut memiliki target tertentu sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah kemiskinan dipermukaan bumi ini.

Kemiskinan identik dengan penyakit, sehingga langkah pertama penanggulangan kemiskinan adalah dengan memahami kemiskinan sebagai suatu masalah. Cara ini mengikuti alur berfikir manajemen perencanaan strategis, karena memahami suatu masalah berarti telah menapaki 50% jalan penyelesaian masalah tersebut. Untuk memahami masalah kemiskinan kita perlu memandang kemiskinan dari 2 (dua) aspek yakni ; kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebagai proses.

Sebagai kondisi, kemiskinan adalah fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup dibawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai “*kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan*

mengembangkan kehidupan yang bermartabat” Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

4. Gejala Kemiskinan

Menurut Siagian, (2012:16) “*Salah satu cara dan langkah pertama dalam memahami masalah kemiskinan adalah melalui penelusuran gejala-gejala kemiskinan*” meliputi :

- a) Kondisi kepemilikan faktor produksi.
Kemiskinan tidak datang secara tiba-tiba, begitu pula halnya dengan pendapatan yang tidak datang secara mendadak, tetapi semuanya terjadi melalui saluran dan proses tertentu.
- b) Angka ketergantungan penduduk.
Minimnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu Negara menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan semakin tinggi.
- c) Kekurangan gizi
Pemenuhan kebutuhan fhisik merupakan salah satu faktor utama, sehingga jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang atau sekelompok orang akan teridentifikasi sebagai kekurangan gizi dan menjadi gejala betapa miskinnya seseorang ataupun sekelompok orang tersebut.
- d) Pendidikan yang rendah
Rendahnya tingkat pendidikan seseorang atau sekelompok orang dalam jumlah yang relatif besar dan bukan disebabkan oleh rendahnya kesadaran terhadap pendidikan, namun lebih kepada ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

5. Tipe Kemiskinan.

Menurut Siagian (2012:70) terdapat 3 (tiga) tipe orang miskin berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap orang per-tahunnya yakni :

- a) **Miskin**, yakni orang miskin yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam bentuk beras adalah 320 kg/orang/tahun.
- b) **Sangat Miskin**, yakni orang yang berpenghasilan setara dengan beras yang diperolehnya sebanyak 240 kg/orang/tahun.
- c) **Termiskin**, yakni orang yang berpenghasilan jika dikonversikan dengan beras yang diperolehnya sebanyak 180 kg/orang/tahun.

Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah :

a) *Kemiskinan Natural*

Keadaan miskin karena sejak awalnya memang miskin

b) *Kemiskinan Kultural*

Keadaan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak berusaha

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

c) *Kemiskinan Struktural*

Keadaan dimana akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam satu sistem sosial buaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

6. Penanggulangan Kemiskinan.

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu :

- a) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
- b) Mendorong pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat miskin.
- c) Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
- d) Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
- e) Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

7. Program Keluarga Harapan.

a) Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ketentuan KPM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

b) Sasaran Penerima PKH

Sasaran peserta PKH adalah KPM dan yang memiliki komponen kesehatan seperti ; ibu hamil, nifas, Balita, anak sekolah, dan komponen anak sekolah yaitu ; SD sederajat, SLTP sederajat dan SLTA sederajat ataupun anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, penyandang disabilitas berat dan Lanjut usia (Lansia) yaitu di atas 70 tahun.

Program PKH terdiri dari tiga komponen meliputi ; pendidikan yang mensyaratkan anak-anak peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku.

c) Besaran Bantuan PKH

Besaran bantuan tunai ataupun non tunai untuk peserta PKH bervariasi, tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerima bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga pada saat tertentu. Adapun nominal bantuan yang diterima oleh PKM tergantung pada kategori yang dimiliki sesuai tabel di bawah ini :

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEK BANTUAN
----	------------------	---------------

		(Rp/Tahun/Keluarga)
1	KPM reguler	1,890,000,-
2	KPM Lanjut Usia	2,000,000,-
3	KPM Penyandang Disabilitas	2,000,000,-
4	KPM di Papua dan Papua Barat	2,000,000,-

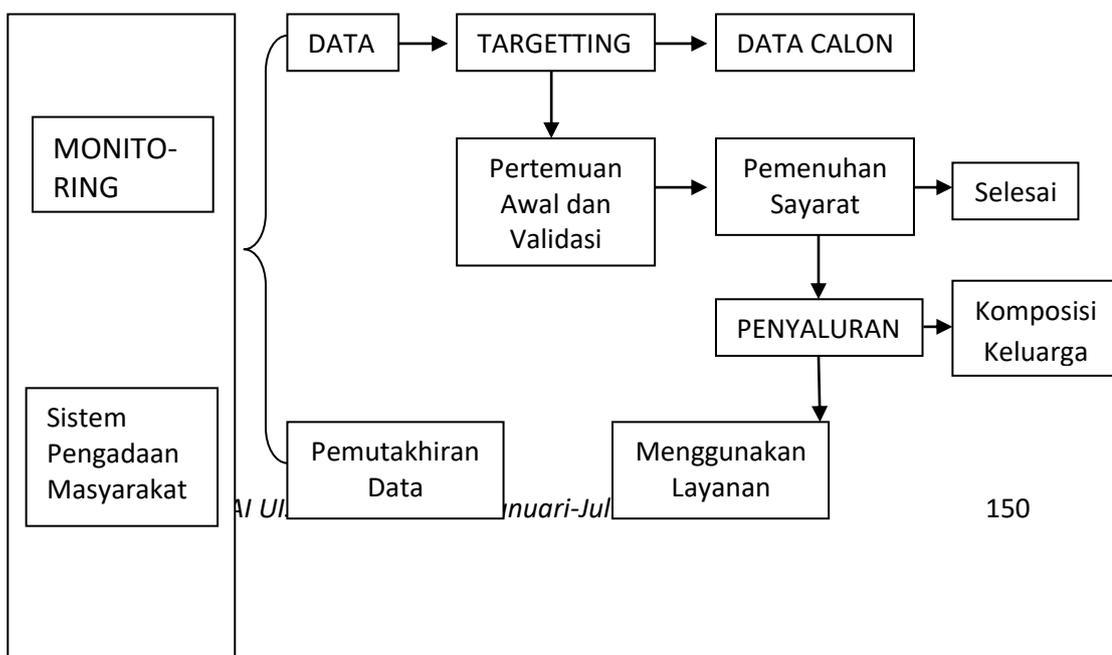
Sumber : Departemen Sosial Republik Indonesia

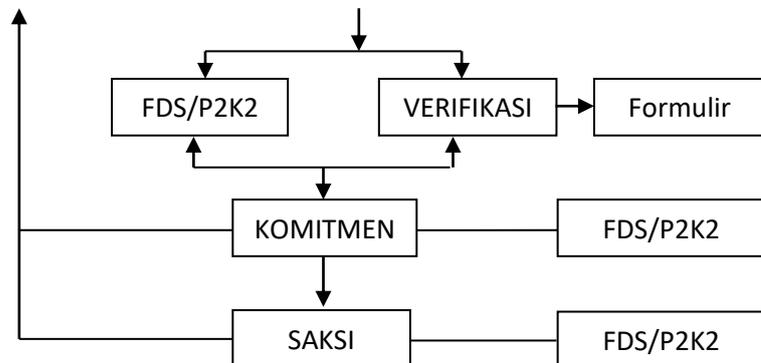
Penyaluran bantuan PKH dijadwalkan setiap tiga bulan sekali, sehingga dalam satu tahun penyaluran bantuan PKH dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yang dimulai pada bulan Januari.

8. Pengorganisasian.

PKH dilaksanakan oleh PPKH Pusat, PPKH Kabupaten/Kota dan pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peranan penting dalam menjamin keberhasilan PKH, yakni :

- a) PPKH Pusat (Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat), merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program.
- b) PPKH Kabupaten/Kota (Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota), melaksanakan program dan memastikan alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- c) PPKH Kecamatan, merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota.
- d) Operator, bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas penerimaan, pendistribusian dan pengelolaan data dan informasi kegiatan PKH.
- e) Mekanisme Pelaksanaan PKH, proses mekanisme pelaksanaan PKH merupakan siklus berulang kegiatan PKH, dimana proses ini harus terlaksana baik bagi penerima manfaat jga pelaksana PKH di semua tingkatan, sejak tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan.





Gambar-1 : Mekanisme Pelaksanaan PKH (Buku Pedoman PKH)

Kerangka Konsep dan Operasional

Menurut Masri Singarimbun (2005:33) “*Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial*” Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan dengan yang lainnya.

Sejalan dengan hal ini, maka peneliti mengajukan kerangka konsep dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL-1 : INDIKATOR PENELITIAN

NO	INDIKATOR	KONSEP
1	Standart dan Sasaran	Harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan
2	Sumber Daya	Perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun non manusia
3	Komunikasi dan Hubungan	Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain
4	Karakteristik Agen Pelaksana	Dukungan yang diberikan dari organisasi formal maupun informal yang tidak termasuk di dalam struktur organisasi
5	Disposisi	Watak dan Karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis
6	Kondisi Sosial dan Ekonomi	Karakteristik para partisipan yakni ; mendukung atau menolak

1. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok, baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk keputusan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai dan non tunai bersyarat untuk membantu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) guna memperoleh akses pelayanan dasar yakni ; pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial dan bagi penyandang disabilitas berat, ringan dan Lansia.
3. Implementasi PKH adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan program keluarga harapan melalui pemberian bantuan tunai dan non tunai bersyarat terhadap KPM guna memperoleh akses pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan.

Penutup

Berdasarkan hasil sajian dan analisa data peneltian ini, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Standar dan sasaran kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan yang terdiri dari mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan, manfaat dana bagi peserta PKH dan waktu pembagian dana pada umumnya semua telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PKH. Begitu pula dengan manfaat dana PKH telah mampu meringankan beban peserta PKH baik di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan PKH di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan telah memadai, sehingga dalam menjalankan tugasnya hamper tidak ada kendala sama sekali. Sedangkan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan PKH telah berjalan dengan baik dan lancar, masing-masing pihak saling memberikan masukan dan informasi terkait pelaksanaan PKH. Karakteristik agen pelaksana yang termaktub ke dalam struktur organisasi sangat membantu proses pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten/Kota. Dari segi Disposisi ; masing-masing pihak telah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan pihak pelaksana juga menjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi sosial ekonomi para peserta PKH di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan secara umum telah dapat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik komponen kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi peserta yang memiliki Balita dibawa ke Posyandu, dan anak usia Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA telah hadir ke sekolah dengan jumlah kehadiran yang tidak melanggar PKH.

Daftar Bacaan

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Budi winarno, *Kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta : CAPS, 2012.

Buku Pedoman Keluarga Harapan (PKH)

Dunn, William N. *Pengantar analisis kebijakan publik edis kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003

Dwiyanto Indiahono, “*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*”. Yogyakarta, Gava Media. 2017

Edward III Dalam Jamaluddin Ahmad, “ *Prilaku Birokrasi Dan Pengambilan Keputusan*”, (Makasar:Unm, 2011) (Jurnal Politik Profenik)

Kartasasmita, Ginanjar, *Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, Malang, Unibrow, Fakultas Ilmu Administrasi, 2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang *Pelaksana Undang-Undang Desa*.

Siagian, Matias., *Kemiskinan dan Solusi*, Medan.,PT. Grasindo Monoratama. 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*, Bandung, Alfabeta. 2016

Volume 1 Agustus 2008 Universitas Pebabari Makassar, 2008